

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian biofisik, kimia, dan ekologi perairan pada tujuh danau di Kabupaten Barito Selatan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem danau-danau tersebut masih memiliki nilai ekologis yang signifikan sebagai habitat perairan darat, khususnya dalam mendukung keanekaragaman ikan air tawar, fungsi daerah asuhan (*nursery ground*), daerah pemijahan (*spawning ground*), serta penyangga produktivitas perikanan perairan umum. Meskipun sebagian danau telah mengalami tekanan antropogenik, kondisi kualitas air secara umum masih berada dalam kisaran yang mendukung kehidupan biota akuatik, sehingga memberikan peluang besar bagi upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

Analisis kesesuaian kawasan konservasi menunjukkan bahwa tidak seluruh danau memiliki tingkat kelayakan yang sama untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan tingkat perlindungan yang seragam. Variasi kondisi ekologis, keanekaragaman hayati, tutupan vegetasi riparian, serta intensitas tekanan manusia menyebabkan perbedaan tingkat kesesuaian antar danau. Danau dengan keanekaragaman spesies tinggi, kualitas habitat relatif baik, serta tekanan antropogenik yang masih dapat dikendalikan memiliki tingkat kesesuaian yang lebih tinggi sebagai kawasan konservasi perairan, sementara danau dengan tekanan pemanfaatan tinggi memerlukan pendekatan pengelolaan adaptif dan bertahap.

Merujuk pada Tabel 17, danau-danau yang berada pada kategori kesesuaian tertinggi, yaitu **danau Lelek dan Keranen Kecil** direkomendasikan sebagai lokasi prioritas awal kawasan konservasi perairan darat. Sementara itu, **danau Mengkare**,

Bateken, Mangguruh, Raya dan Melawen berada pada kategori kesesuaian menengah dan direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan konservasi tahap lanjutan.

Dari perspektif konservasi perairan darat, temuan ini menegaskan bahwa penetapan kawasan konservasi danau di Kabupaten Barito Selatan merupakan langkah strategis untuk mencegah degradasi ekosistem lebih lanjut dan melindungi spesies ikan lokal yang bernilai ekologis maupun ekonomis. Keberadaan kawasan konservasi danau berpotensi berfungsi sebagai *ecological refugia*, menjaga stabilitas struktur komunitas ikan, serta mendukung ketahanan ekosistem terhadap tekanan perubahan iklim dan aktivitas manusia. Dengan demikian, konservasi danau tidak hanya berorientasi pada perlindungan spesies, tetapi juga pada pemeliharaan fungsi ekosistem perairan darat secara menyeluruh.

Implikasi pengelolaan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan konservasi danau perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis sains dan kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta kelembagaan adat. Strategi pengelolaan yang disusun harus disesuaikan dengan tingkat kesesuaian masing-masing danau, melalui pengaturan zonasi, pembatasan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta perlindungan vegetasi riparian. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dapat menjadi dasar ilmiah dalam perencanaan tata ruang serta pengelolaan perairan darat yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan metode analisis kesesuaian kawasan konservasi perairan darat berbasis indikator ekologis dan sosial, serta menjadi rujukan awal bagi perumusan kebijakan konservasi danau di tingkat daerah. Hasil kajian ini diharapkan dapat mendukung upaya

konservasi yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan, serta menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan terkait efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan darat di wilayah Kalimantan Tengah.

5.2 Rekomendasi

Keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi danau di Kabupaten Barito Selatan tidak hanya bergantung pada tingkat kesesuaian ekologis danau yang telah diidentifikasi melalui penelitian ini, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberadaan kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan. Tanpa dukungan regulasi daerah yang mengikat serta mekanisme kelembagaan yang mampu mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan, hasil kajian ilmiah berpotensi tidak terimplementasi secara efektif di lapangan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Konservasi Danau atau Pengelolaan Perairan Darat sebagai landasan hukum utama dalam menjamin keberlanjutan kawasan konservasi perairan darat. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian regulatif, memperjelas pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta menjadi dasar pengaturan pemanfaatan dan perlindungan danau secara berkelanjutan. Keberadaan Perda juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi danau tetap berjalan lintas periode pemerintahan dan tidak bergantung pada kebijakan sektoral yang bersifat jangka pendek.

Perda Pengelolaan dan Konservasi Danau diharapkan mampu mengakomodasi keragaman kondisi ekologis dan sosial danau-danau di Kabupaten Barito Selatan, termasuk variasi tingkat kedekatan masyarakat dengan lokasi danau. Danau yang

berada dekat dengan permukiman masyarakat memiliki potensi pengelolaan dan pengawasan berbasis komunitas yang lebih kuat, sedangkan danau yang relatif jauh dari permukiman memerlukan pengaturan pengawasan yang lebih terstruktur dan dukungan kelembagaan yang lebih intensif. Dengan demikian, Perda tidak hanya berfungsi sebagai aturan perlindungan, tetapi juga sebagai kerangka adaptif yang mempertimbangkan dimensi spasial dan sosial dalam pengelolaan perairan darat.

Sebagai pelengkap dan instrumen operasional dari Perda tersebut, diperlukan pembentukan Forum Komunikasi Multipihak atau *Technical Working Group* (TWG) Pengelolaan Kawasan Konservasi Danau. TWG diposisikan sebagai kelompok kerja teknis dan kolaboratif yang berperan menjembatani hasil kajian ilmiah dengan implementasi kebijakan dan pengelolaan di lapangan. Keberadaan TWG menjadi penting mengingat pengelolaan danau melibatkan berbagai sektor dan kepentingan, mulai dari konservasi lingkungan, perikanan, tata ruang, hingga aspek sosial ekonomi masyarakat.

TWG Pengelolaan Kawasan Konservasi Danau idealnya melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi dan pakar perairan darat, perwakilan masyarakat lokal dan tokoh adat, kelompok nelayan, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui komposisi multipihak tersebut, TWG berfungsi sebagai wadah koordinasi, konsultasi teknis, dan penyusunan rekomendasi pengelolaan yang berbasis bukti ilmiah dan pengetahuan lokal.

Secara fungsional, TWG berperan dalam mendukung pelaksanaan Perda, antara lain melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi danau, fasilitasi penetapan zonasi dan aturan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi kondisi ekosistem danau, serta penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Dengan adanya TWG, proses

pengelolaan kawasan konservasi danau dapat dilakukan secara adaptif dan partisipatif, sekaligus meningkatkan legitimasi sosial terhadap kebijakan yang diterapkan.

Integrasi antara Peraturan Daerah sebagai kerangka regulasi dan TWG sebagai mekanisme kelembagaan operasional diharapkan mampu memastikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi danau di Kabupaten Barito Selatan berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kondisi ekologis serta sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan arah kebijakan dan kelembagaan yang aplikatif dalam mendukung konservasi perairan darat dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

